

ANALISIS
KEBERHASILAN PEMDA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
(Ditinjau dari Pelaksanaan APBD secara *Value for Money* = Efektif, Efisien, Ekonomis)

PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH

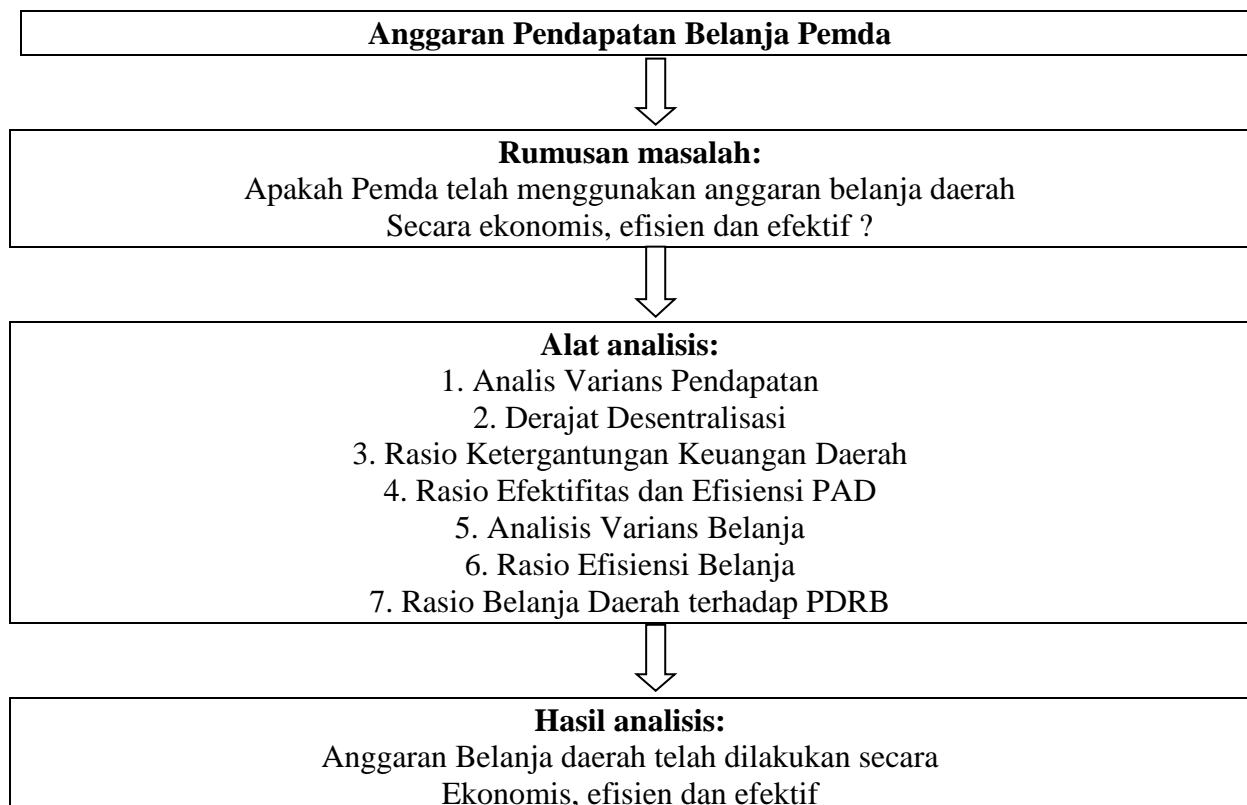
Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis pendapatan dan belanja daerah secara umum terlihat dari laporan realisasi anggaran. Melalui realisasi anggaran kita dapat melakukan analisis pendapatan dan belanja daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomis, antara lain dengan cara:

- 1) Analisis Varians Pendapatan
- 2) Derajat Desentralisasi
- 3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
- 4) Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD
- 5) Analisis Varians Belanja
- 6) Rasio Efektivitas Belanja
- 7) Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

KERANGKA BERPIKIR

Alur dari kerangka konsep penelitian dapat dilihat sbb:



RINCIAN DATA YANG DIPERLUKAN

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan, maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Daerah yang diteliti
2. Struktur Anggaran dan Realisasi Anggaran PAD
3. Data untuk perhitungan analisis belanja yang berasal dari Laporan Keuangan Daerah, yaitu Laporan Realisasi APBD minimal selama 2 tahun.
4. Data lainnya yang relevan

JANGKAUAN PENELITIAN

- Penelitian dilakukan di kantor BAPPEDA atau Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- Penelitian difokuskan pada APBD minimal 2 tahun

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) → kegiatan pengumpulan data yang didasarkan atas keadaan sesungguhnya di lapangan.

Penelitian Lapangan dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a) Wawancara : suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara langsung kepada Pimpinan Kantor dan bagian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b) Teknik Observasi: suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan melakukan pencatatan secara tertulis terhadap setiap kejadian yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) → penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari teori dan informasi yang erat hubungannya dengan objek penelitian sebagai pedoman pokok dalam pengumpulan data di lapangan.

ALAT ANALISIS

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan Daerah.

Analisis varians Anggaran Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara **menghitung selisih antara Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah**. Analisis ini akan menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian Target Pendapatan Daerah.

Dalam analisis ini hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah:

- 1) Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan (target pendapatan) dengan realisasi pendapatan baik secara **nominal** maupun **persentase**.
- 2) Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
- 3) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari Total Pendapatan
- 4) Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan.

Pemerintah Daerah dikatakan memiliki **kinerja pendapatan yang baik** → apabila **mampu memperoleh realisasi pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (ditargetkan)**. Sebaliknya apabila **realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan** maka hal itu **dinilai kurang baik**. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi **jika target pendapatan tidak tercapai** hal ini **butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target**.

Penetapan target harus didasarkan pada analisis kondisi dan potensi yang ada secara riil.

B. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara **Jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah**. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. **Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi)**.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

C. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan Jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah (Dana Perimbangan) dengan Total Penerimaan Daerah. **Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.**

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{R. Pendapatan Transfer}}{\text{R. Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Ket → R = Realisasi

D. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan **Realisasi Penerimaan PAD dengan Target Penerimaan PAD** (yang dianggarkan). Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi Penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan kondisi dan potensi riil yang dimiliki.

Secara umum nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Efektifitas PAD.

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efektif	>100 %
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90 % - 99 %
Kurang Efektif	75 % - 89 %
Tidak Efektif	<75 %

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektifitas PAD saja belumlah cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik akan tetapi bila ternyata untuk mencapai target tersebut **memerlukan biaya sangat besar** maka berarti pemungutan PAD tersebut **tidak efisien**.

Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang **biaya pemungutan PAD**.

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan PAD.

Secara umum nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Efisiensi PAD.

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efisien	<10 %
Efisien	10 % - 20 %
Cukup Efisien	21 % - 30 %
Kurang Efisien	31 % - 40 %
Tidak Efisien	>40 %

E. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap **perbedaan** atau **selisih** antara **realisasi Belanja Daerah** dengan **Anggaran Belanja Daerah (Target Belanja Daerah)**. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians Belanja ini adalah:

- a) Mempertanyakan alasan terjadinya varians (selisih). Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan?
- b) Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak?
- c) Berapa tingkat selisih (varians) yang bisa ditoleransi?

F. Rasio Efektivitas Belanja Daerah

Rasio efektivitas belanja merupakan **perbandingan** antara **realisasi Belanja Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah (Target Belanja Daerah)**. Rasio ini digunakan untuk mengukur **tingkat keberhasilan pelaksanaan program** (dilihat dari pencairan anggaran belanja) yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Rasio efektivitas belanja daerah dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Rasio efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$
--

G. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB (Product Domestic Regional Brutto)

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan **perbandingan antara total Belanja Daerah dengan PDRB** yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktifitas daerah dan efektifitas Belanja Daerah. Selain itu kita juga dapat melihat tingkat ekonomis Pemerintah Daerah pada pelaksanaan Belanja Daerah dalam rasio ini.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Rasio Belanja daerah thd PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$
--